



Rp 65 M untuk Pembelian Lahan Ruang Publik

UMBULHARJO (MERAPI) - Program menabung tanah yang digulirkan Pemkot Yogyakarta mulai dilakukan dengan langkah nyata. Hal itu seiring dengan penambahan anggaran pembelian lahan milik warga untuk kepentingan ruang publik dalam APBD Perubahan 2018.

"Di APBD Perubahan anggaran untuk membeli 19 lahan senilai Rp 65 miliar sudah disetujui dewan. Itu bagian dari upaya untuk membuat bank tanah," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Selasa (11/9).

Dengan disetujuinya anggaran pembelian 19 lahan pada APBD Perubahan 2018, Kota Yogyakarta akhirnya bisa menambah pengadaan lahan tahun ini. Sebelumnya pada APBD 2018 Yogyakarta dianggarkan sekitar Rp 4 miliar untuk pengadaan lahan guna ruang terbuka hijau publik.

Heroe menyatakan lahan yang akan dibeli tersebut sebagian besar dari usulan masyarakat tahun lalu. Dia mengaku usulan pembelian itu lebih dari 19 lahan. Tapi diprioritaskan pada lahan-lahan strategis dan bisa memenuhi fungsinya untuk ruang-ruang publik seperti ruang terbuka hijau, perkantoran pemkot dan gedung un-

tuk sekolah.

"Lahan milik warga yang nantinya dibeli sebagian digunakan untuk ruang terbuka hijau, sekolah dan perkantoran seperti kelurahan," imbuhnya.

Pengadaan lahan selama ini telah dilakukan Pemkot Yogyakarta setiap tahun untuk ruang terbuka hijau publik. Dia menjelaskan harga pembelian lahan warga oleh Pemkot Yogyakarta berdasarkan penilaian appraisal. Diakuinya sebagian pemilik lahan tidak sepatutnya dengan harga dari nilai appraisal, sehingga pembelian lahan tidak terwujud. "Sebagian besar sudah diproses tahun lalu. Tapi ada beberapa yang gagal terealisasi," papar Heroe.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana mengatakan, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Mantrijeron gagal lantaran tidak ada kesepakatan harga pembelian tanah hasil appraisal. Sementara pengadaan tanah untuk kebutuhan pemindahan kantor Kelurahan Suryatmajan juga terganjal karena status kepemilikannya belum turun waris.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005